

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Wilayah

2.1.1 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Berada di tengah Pulau Jawa, menjadikannya jalur penting antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi ini memiliki keanekaragaman budaya, tradisi, dan destinasi wisata yang kaya. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga termasuk ke dalam provinsi yang padat penduduk. Industri, perdagangan, dan pertanian menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bekerja dan menetap.

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat di sebelah barat dan Jawa Timur di sebelah timur. Selain itu, Jawa Tengah juga berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan. Secara geografis, provinsi ini berada di antara 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, mencakup pula wilayah Pulau Karimunjawa. Jarak terjauh dari barat ke timur provinsi ini mencapai 263 km, sedangkan dari utara ke selatan sejauh 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, dengan 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa. Luas wilayah provinsi ini adalah sekitar 3,43 juta hektar, yang mencakup 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau 1,70 persen dari total luas Indonesia.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah juga secara astronomis terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayah paling kecil yaitu Kota Magelang dengan luas 18,56 km². Sementara itu, wilayah dengan total area terluas terdapat Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah 2023, total keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 34.337,48 km².

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ibukota Kabupaten/Kota <i>Capital of Regency/Municipality</i>	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten/Regency		
1. Cilacap	Cilacap	2.323,93
2. Banyumas	Purwokerto	1.391,15
3. Purbalingga	Purbalingga	805,76
4. Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,90
5. Kebumen	Kebumen	1.334,10
6. Purworejo	Purworejo	1.081,96
7. Wonosobo	Wonosobo	1.011,62
8. Magelang	Mungkid	1.129,98
9. Boyolali	Boyolali	1.096,59
10. Klaten	Klaten	701,50
11. Sukoharjo	Sukoharjo	493,53
12. Wonogiri	Wonogiri	1.905,74
13. Karanganyar	Karangayar	803,05
14. Sragen	Sragen	994,57
15. Grobogan	Purwodadi	2.023,85
16. Blora	Blora	1.957,29
17. Rembang	Rembang	1.037,54
18. Pati	Pati	1.572,90
19. Kudus	Kudus	447,44
20. Jepara	Jepara	1.020,25
21. Demak	Demak	977,77
22. Semarang	Ungaran	1.019,27
23. Temanggung	Temanggung	864,83
24. Kendal	Kendal	1.008,12
25. Batang	Batang	857,27
26. Pekalongan	Kajen	892,91
27. Pemalang	Pemalang	1.137,41
28. Tegal	Slawi	983,90
29. Brebes	Brebes	1.742,81
Kota/Municipality		
1. Magelang	Magelang	18,56
2. Surakarta	Surakarta	46,72
3. Salatiga	Salatiga	54,98
4. Semarang	Semarang	370,00
5. Pekalongan	Pekalongan	46,20
6. Tegal	Tegal	39,08
Jawa Tengah		34.337,48

Tabel 2. 1 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, pemanfaatan lahan di Jawa Tengah didominasi oleh sektor pertanian, baik untuk lahan basah maupun lahan kering. Lahan basah mencakup 47,96 % dari total wilayah. Sementara itu, lahan terbangun meliputi 19,39 % atau sekitar 665.708 hektar. Selain itu, lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan mencapai 18,86 % dari keseluruhan wilayah. Hutan di Jawa Tengah terdiri dari dua jenis, yaitu hutan negara seluas 767,04 ribu hektar dan hutan rakyat seluas 682,43 ribu hektar. Produksi kayu dari hutan mencakup berbagai jenis, yakni kayu bulat sebesar 3.487,31 ribu m³, kayu gergajian sebesar 368,13 ribu m³, kayu lapis sebesar 903,35 ribu m³, serta veneer sebesar 312,02 ribu m³.



Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah
 Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah 2024, topografi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi, dari mulai ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl) mendominasi wilayah sepanjang pantai utara, mencakup 53,3 % dari total area. Ketinggian 100-500 mdpl meliputi 27,4 % wilayah, sedangkan area dengan ketinggian 500-1.000 mdpl mencakup 14,7 %. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, yang berada di bagian tengah, mencakup 4,6 %. Keberagaman topografi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata, menawarkan keindahan alam yang beragam. Contohnya adalah Kabupaten Wonosobo, yang terkenal sebagai salah satu daerah tertinggi di Jawa Tengah, serta wilayah pesisir seperti Kabupaten Jepara yang juga menjadi destinasi wisata unggulan.

Wilayah topografi Provinsi Jawa Tengah yang bervariasi dapat ditandai oleh adanya dataran tinggi yang membentang di bagian tengah, dikelilingi oleh dataran rendah di sekitarnya, serta kawasan pantai di bagian utara dan selatan. Pantai-pantai tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Di pantai utara, dataran rendah relatif sempit, sementara di pantai selatan terdapat formasi Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng. Selain itu, di pantai selatan juga terdapat dataran rendah yang sempit dengan lebar sekitar 10 hingga 25 kilometer, memberikan ciri khas unik pada wilayah tersebut.

2.1.1.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 37.540.962 jiwa. Penduduk ini terbagi menjadi 18.866.423 jiwa laki-laki dan 18.674.539 jiwa perempuan. Data tersebut tentu menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 1,00 %, hal ini tentu mencerminkan pertumbuhan yang stabil di wilayah tersebut. Angka rasio jenis kelamin pada tahun 2023, yang mengukur perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, tercatat sebesar 101,0. Artinya, terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di provinsi ini. Hal ini menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah 2023, kepadatan penduduk di Jawa Tengah rata-rata mencapai 200 jiwa per kilometer persegi, meskipun terdapat variasi yang cukup besar di antara 35 kabupaten/kota yang ada. Kota Surakarta (Solo) memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 11.258 jiwa per kilometer persegi, karena wilayahnya yang kecil tetapi sangat urban. Sebaliknya, Kabupaten Blora mencatat tingkat kepadatan terendah, yakni hanya 490 jiwa per kilometer persegi, yang mencerminkan karakter wilayahnya yang lebih pedesaan dan luas. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah mencapai 21,07 juta orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,72 %. Tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini tercatat sebesar 5,13 %. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur,

mayoritas penduduknya berada dalam kategori usia produktif. Angka ketergantungan di Jawa Tengah tercatat sebesar 44,12, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang dari kelompok usia non-produktif.

Saat ini, Jawa Tengah sedang menikmati masa bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya berada dalam kelompok usia produktif. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), komposisi penduduk Jawa Tengah didominasi oleh Generasi Z, Generasi Milenial, dan Generasi X. Generasi Z mencakup 25,31% dari total populasi, diikuti oleh Generasi Milenial sebesar 24,93 %, dan Generasi X sebesar 22,53 %.

Seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup di Jawa Tengah terus membaik. Hal ini turut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Dengan kondisi tersebut, Jawa Tengah perlu bersiap menghadapi masa transisi menuju *ageing population*, yaitu ketika proporsi penduduk lansia mulai mendominasi. Perubahan ini memerlukan langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan, termasuk dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial.

2.2 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah lembaga pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengelola kepegawaian daerah. BKD berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, BKD didefinisikan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan manajemen PNS guna mendukung pelaksanaan tugas utama Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki SDM yang kompeten dan profesional untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Tujuan utama dari tugas ini adalah membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki integritas tinggi, wawasan global, serta mampu menjadi pengikat persatuan bangsa. Dengan semangat idealisme, BKD berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada ASN, meningkatkan kinerja mereka, dan mewujudkan sistem karier yang adil serta berbasis prestasi.

Ruang lingkup pelayanan yang tersedia di BKD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penempatan PNS dalam jabatan;
2. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) pada masing-masing SKPD;
3. Penyusunan dan penetapan formasi PNS, CPNS dan PTT;
4. Pengadaan CPNS dan PTT;
5. Analisis dan penyusunan Program Diklat;
6. Pengukuran kompetensi jabatan;

7. Evaluasi kinerja;
8. Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemindahan PNS;
9. Pemberhentian PNS;
10. Kesejahteraan PNS;
11. Pembinaan hak dan kewajiban serta penghargaan PNS;
12. Pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian;
13. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
14. Pelayanan internal BKD

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024



Gambar 2. 2 Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

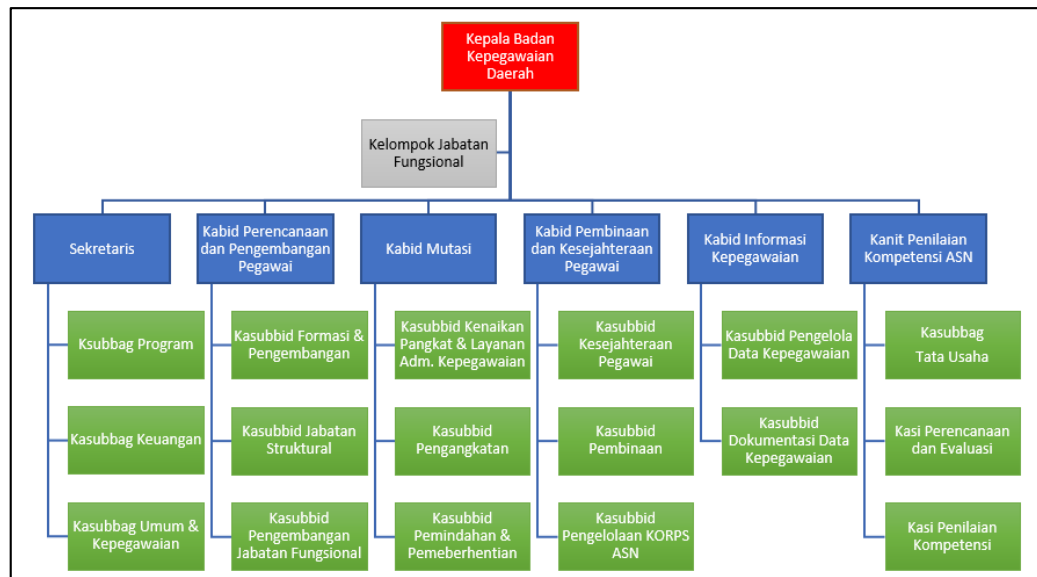
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.2.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bertugas mendukung Gubernur dalam menjalankan fungsi pendukung pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi dan Informasi Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi, dan Informasi Kepegawaian;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi, dan Informasi Kepegawaian;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi dan Informasi Kepegawaian;
- e) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi, dan Informasi Kepegawaian;
- f) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BKD Jateng

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.2.3 Tim Pelaksana Manajemen Talenta

Dalam pelaksanaan manajemen talenta, terdapat tim pelaksana yang menjalankan tugas dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai penyampaian laporan hasil seleksi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2021 tim pelaksana terdiri dari:

- a) Pejabat yang Berwenang;
- b) Pejabat Pimpinan Tinggi terkait, yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional BKD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk;
- c) Tim Penilai Eksternal, yaitu Akademisi dari konsorsium perguruan tinggi yang ditunjuk.

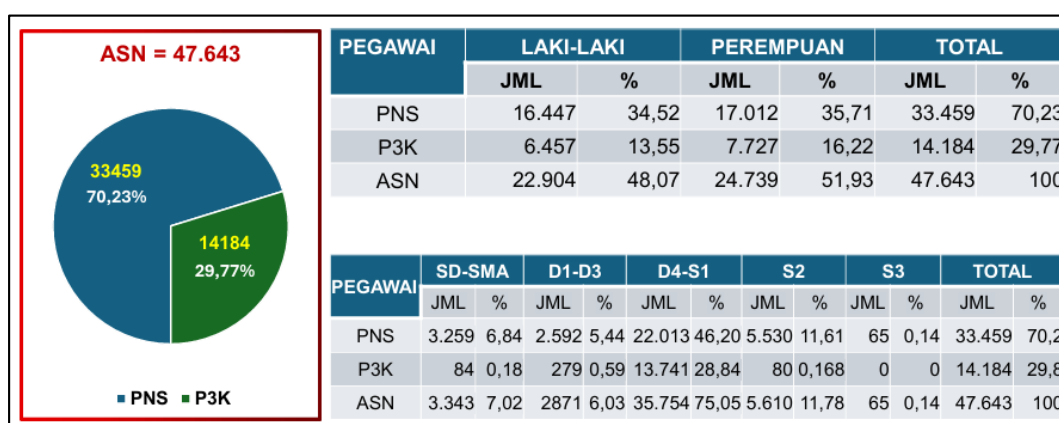
Selain itu, juga terdapat Tim Penilai Kinerja yang berguna dalam memberikan pertimbangan terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Tim penilai kinerja terdiri dari:

- a) Gubernur selaku Penanggung Jawab;
- b) Wakil Gubernur selaku Pengarah;
- c) Sekretaris Daerah selaku Ketua;
- d) Pejabat Pimpinan Tinggi yang menangani bidang kepegawaian sebagai anggota;
- e) Pejabat Pimpinan Tinggi yang menangani bidang pengawasan internal sebagai anggota; dan
- f) Pejabat Pimpinan Tinggi Terkait sebagai anggota.
- g) Pejabat Administrator yang membidangi Kepegawaian sebagai Sekretaris.

2.3 Gambaran Umum Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi tantangan dalam mengelola dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Meskipun banyak ASN yang berpendidikan tinggi, masih ada sebagian pegawai yang berpendidikan rendah. Selain itu, proporsi pegawai dengan jenjang pendidikan tinggi (S2 dan S3) masih relatif kecil. Pemerintah daerah perlu terus melakukan upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Secara keseluruhan, ASN di Jawa Tengah merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tantangan utama terkait peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Sebagian besar pegawai di Provinsi Jawa Tengah memiliki jenjang

pendidikan tinggi, terutama di tingkat D4-S1 yang mencakup 75,04% dari total ASN. Meski demikian, ada juga pegawai yang memiliki pendidikan SD hingga SMA, meskipun jumlahnya relatif kecil (sekitar 7,02%). Selain itu, ada 10,76% ASN yang memiliki pendidikan S2, dan hanya 0,14% yang berpendidikan S3. Berikut jumlah pegawai Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Sumber : TPPS Jateng, 2024

Dalam hal golongan, mayoritas PNS berada di Golongan III (62,57%), sementara Golongan II dan IV masing-masing mencakup 9,82% dan 27,22%. Hanya 0,38% PNS yang berada di Golongan I. Dalam hal P3K, data menunjukkan bahwa sebagian besar P3K berada di Kelas Jabatan IX (96,23%), diikuti oleh Kelas Jabatan VII (1,97%). Selain itu, data menunjukkan bahwa pejabat struktural di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.079 orang, dengan mayoritas berada di Eselon IV (60,70%), diikuti oleh Eselon III (34,01%), dan Eselon II (5,19%). Jumlah terbesar dari P3K direkrut pada tahun 2023 (4.545 orang), yang menyoroti adanya perekrutan yang signifikan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan distribusi pegawai di Provinsi Jawa Tengah yang didominasi oleh

PNS Golongan III dan ASN dengan rentang usia produktif, dengan sejumlah tantangan dalam pengelolaan ASN berusia di atas 55 tahun serta distribusi P3K yang mayoritas berada di kelas jabatan rendah. Berikut rincian data pegawai Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Usia dan Golongan:

PEGAWAI	10-30 TH		31-45 TH		46-55 TH		>55 TH		TOTAL	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
PNS	1.459	3,06	9.407	19,74	13.614	28,58	8.979	18,85	33.459	70,23
P3K	1.537	3,23	10.536	22,11	1.853	3,89	258	0,54	14.184	29,77
ASN	2.996	6,29	19.943	41,86	15.467	32,46	9.237	19,39	47.643	100

P3K MENURUT KELAS JABATAN			P3K MENURUT TMT			PNS MENURUT GOLONGAN			PEJABAT STRUKTURAL		
P3K/KELAS JABATAN	JML	%	TMT	JML	%	PNS/GOL	JML	%	ESELON	JML	%
V	55	0,39	2021	312	2,20	I	128	0,38	I	1	0,09
VI	0	0,00	2022	9.327	65,76	II	3.287	9,82	II	56	5,19
VII	279	1,97	2023	4.545	32,04	III	20.936	62,57	III	367	34,01
VIII	1	0,01	TOTAL	14.184	100	IV	9.108	27,22	IV	655	60,70
IX	13.658	96,29				TOTAL	33.459	100	TOTAL	1.079	100
X	191	1,35									
TOTAL	14.184	100									

Gambar 2. 5 Pegawai Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Usia dan Golongan
Sumber : TPPS Jateng, 2024

Distribusi pegawai di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merencanakan suksesi, terutama mengingat proporsi pegawai yang signifikan berada di usia menjelang pensiun (46-55 tahun dan >55 tahun). Dengan mayoritas PNS berada di Golongan III dan P3K yang terkonsentrasi di kelas jabatan rendah, terdapat tantangan dalam memastikan adanya kesinambungan kepemimpinan dan kompetensi di masa mendatang. Regenerasi pegawai melalui rencana suksesi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.